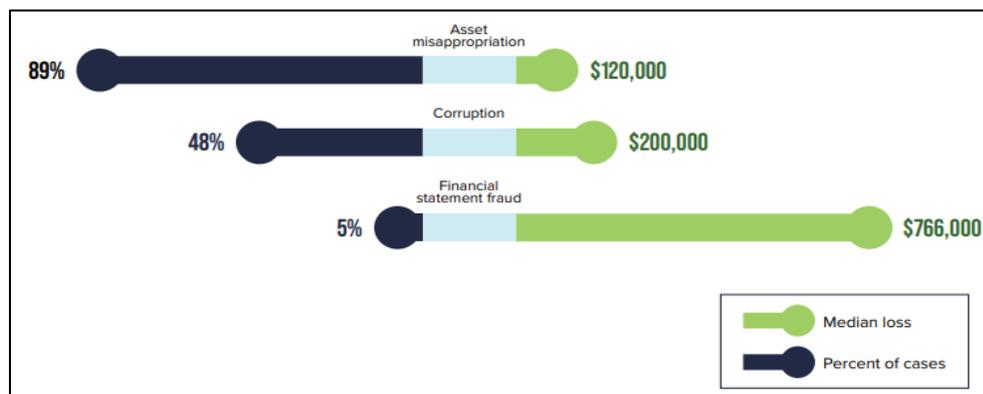


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*) telah berhasil mencuri perhatian publik dalam dunia bisnis modern karena mampu menimbulkan masalah sosial ekonomi yang cukup signifikan, baik dalam sektor publik maupun swasta (Narulita et al., 2024). Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* dalam *Report to the Nations 2024*, kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*) merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara sengaja membuat salah saji atau menghilangkan material dalam pelaporan keuangan organisasi (ACFE, 2024). ACFE (2024) menjelaskan bahwa kecurangan laporan keuangan merupakan kategori kecurangan yang paling jarang terjadi atau hanya sekitar 5% dari total kasus keseluruhan, namun kategori ini mampu menimbulkan angka kerugian median yang paling besar, yaitu sebesar \$766,000.



Gambar 1. 1 Kategori Kasus Kecurangan dan Total Kerugian Kategori Kecurangan

Sumber : (ACFE, 2024)

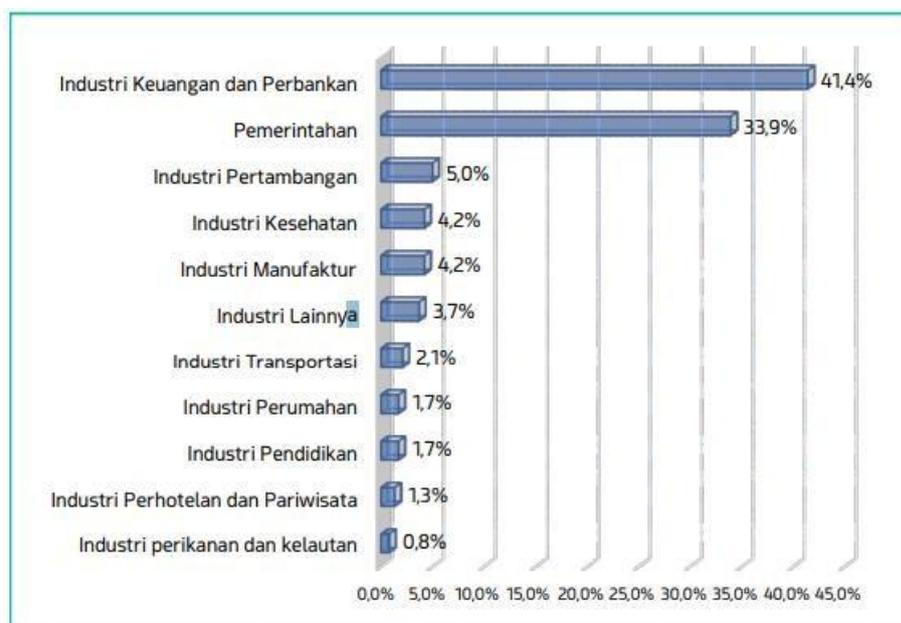
NILAI KERUGIAN	Korupsi	<i>Fraud</i> Laporan Keuangan	Penyalahgunaan Aset/Kekayaan Negara & Perusahaan
Rp. ≤10 Juta	48,1%	67,4%	63,6%
Rp.10 Juta - 50 Juta	4,2%	2,9%	3,3%
Rp.50 Juta - 100 Juta	8,4%	5,4%	8,8%
Rp.100 Juta - 500 Juta	11,7%	6,7%	9,6%
Rp.500 Juta - 1 Milyar	10,9%	6,7%	2,9%
Rp.1 Milyar - 5 Milyar	5,9%	3,8%	3,8%
Rp.5 Milyar - 10 Milyar	5,4%	2,1%	3,4%
Rp. >10 Milyar	5,4%	5,0%	4,6%

Gambar 1. 2 Nilai Kerugian akibat *Fraud* Paling Merugikan di Indonesia

Sumber : Association of Certified Fraud Examiners Indonesia (2019)

Berdasarkan data *Survey Fraud Indonesia* (2019) ditemukan bahwa kasus kecurangan laporan keuangan merupakan kategori *fraud* yang paling sering terjadi dengan persentase sebesar 67,4% (Association of Certified Fraud Examiners Indonesia, 2019). Selain itu, disebutkan juga bahwa industri perbankan dan keuangan merupakan pihak yang paling dirugikan akibat adanya *fraud* dengan persentase sebesar 41,4%. Industri perbankan menjadi salah satu bagian penting dalam perekonomian suatu negara. Hasil laporan bank dunia menyatakan bahwa industri perbankan memegang peran penting dalam memastikan kestabilan dan mendsistem ukung pertumbuhan ekonomi lewat penyediaan layanan keuangan (Bank, 2023). Selain itu, dijelaskan pula bahwa sistem perbankan yang sehat dan efisien mampu mendorong

pertumbuhan ekonomi negara lewat ketepatan dalam pengalokasian sumber daya, dukungan investasi, dan pengelolaan risiko ekonomi (Bank, 2023).



Gambar 1.3 Jenis Industri Yang Paling Dirugikan Karena Fraud

Sumber : Association of Certified Fraud Examiners Indonesia (2019)

Beberapa kasus kecurangan yang terjadi dalam sektor perbankan di Indonesia telah merusak citra industri dan menyebabkan kehilangan kepercayaan publik. Beberapa kasus kecurangan yang terjadi dalam sektor perbankan di Indonesia telah merusak citra industri dan menyebabkan kehilangan kepercayaan publik. Tahun 2023-2025 ditemukan adanya kasus dugaan fraud berupa transaksi negotiable of credit (LC) yang jatuh tempo hingga menimbulkan kerugian mencapai sekitar Rp1,28 triliun di PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (Hasan, 2025). Kasus ini diduga terjadi karena kelemahan proses bisnis hingga melibatkan pihak internal bank. Selain itu, ditemukan kasus dimana kepala cabang Maybank Cipulir melakukan

pencurian dana nasabah dengan total kerugian hingga Rp22 miliar. Tahun 2021, kasus lainnya terjadi pada Bank Mega yang juga turut mengalami kebobolan 23 dana nasabah yang mencapai Rp69 miliar atas perbuatan Kepala Cabang Bank Mega Kota Denpasar (Santi & Wafa, 2024).

Santi & Wafa (2024) menyatakan bahwa berbagai kasus kecurangan yang terjadi pada sektor perbankan mampu menimbulkan dampak negatif yang cukup signifikan, seperti rusaknya reputasi bank, kehilangan kepercayaan nasabah, hingga terjadinya pengalihan dana nasabah kepada bank yang berbeda. Hal ini membuktikan bahwa perbankan memerlukan suatu sistem tata kelola yang baik untuk menangani berbagai tindakan *fraud*. Upaya dalam mencegah *fraud* tidak hanya terbatas pada pembuatan kebijakan, namun juga harus mencakup penerapan sistem pengendalian internal dan eksternal yang berjalan secara optimal.

Salah satu badan tata kelola internal yang berperan penting dalam menangani tindakan *fraud* adalah komite audit (Trijayanti et al., 2021). Imani et al., (2025) menyebutkan bahwa komite audit adalah badan yang ditugaskan dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Umumnya suatu perusahaan memiliki tiga sampai lima atau bahkan tujuh direktur yang berperan menjadi komite audit. Komite audit berperan penting dalam sistem tata kelola perusahaan untuk menjamin pelaksanaan sistem pengendalian internal, mengawasi laporan keuangan, dan memastikan perusahaan untuk mematuhi setiap regulasi yang ada. Pelaksanaan tanggung jawab yang baik dari komite audit terkait fungsi pengawasan dan pemantauan sistem tata

kelola perusahaan dapat turut mendukung perusahaan dalam mencegah peluang *fraud* (Mardani et al., 2020).

Tambunan & Tambunan (2021) menyatakan beberapa tugas Komite Audit berdasarkan pedoman *Good Corporate Governance* diantaranya adalah:

1. Menciptakan sistem pengawasan internal yang efektif
2. Meningkatkan transparansi dan kualitas laporan keuangan
3. Menganalisis cakupan dan ketentuan audit eksternal, kesesuaian biaya audit, independensi serta objektivitas dari audit eksternal
4. Membuat objek pemeriksaan internal berupa pelaporan program kerja dan tugas komite audit selama tahun berjalan yang mewujudkan penerapan prinsip akuntabilitas

Penelitian oleh Trijayanti et al., (2021) menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Artinya, keberadaan komite audit dapat mendukung upaya perusahaan dalam mengurangi peluang terjadinya *fraud* atas laporan keuangan. Namun hasil yang berbeda diperoleh dari penelitian Waruwu & Sugeng (2023) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kecurangan dalam laporan keuangan. Temuan ini menunjukkan kemungkinan terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kekuatan hubungan 2 variabel tersebut.

Ketidakselarasan hasil penelitian terdahulu terkait efektivitas komite audit untuk mencegah potensi kecurangan menunjukkan perlu ada kontribusi

mekanisme *corporate governance* lainnya. Ashma & Laksmi (2023) menyatakan bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) hadir sebagai salah satu komponen penting yang mampu menciptakan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel serta mampu berkontribusi dalam mencegah kecurangan laporan keuangan. Sebagai mekanisme eksternal, CSR berupaya menciptakan tekanan dan pemantauan eksternal yang kuat untuk mengurangi salah saji informasi dan kemungkinan terjadinya *fraud* (Nazari & Poursoleyman, 2025). Fenomena ini berkaitan dengan pandangan teori *stakeholder* yang menekankan perihal tanggung jawab perusahaan yang bukan hanya kepada shareholders, namun juga kepada seluruh stakeholder baik itu masyarakat, lingkungan, dan pihak terkait lainnya (Mahajan et al., 2023).

Pengungkapan CSR berhubungan dengan pelaporan terkait dampak ekonomi, sosial, lingkungan, bahkan dampak suatu kinerja perusahaan berkelanjutan yang termuat dalam laporan tahunan (Yani et al., 2024). Pengungkapan CSR tidak hanya sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap stakeholder, namun juga sebagai wujud perusahaan dengan sistem tata kelola yang baik dan yang menyajikan laporan keuangan dengan mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan optimal dalam mengurangi risiko fraud (Ashma & Laksmi, 2023). Penelitian oleh W. Putri (2023) mengungkapkan 4 tanggung perusahaan yang didasarkan pada teori CSR adalah:

1. Kewajiban ekonomi dalam menghasilkan laba,

2. Kewajiban secara hukum untuk menaati ketentuan dan regulasi yang ada,
3. Kewajiban etis yang dilakukan dengan sukarela meskipun tidak diharuskan atau diwajibkan oleh hukum.

Gen et al., (2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa CSR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan dan pengungkapan kecurangan, yang berarti perusahaan dengan tingkat CSR tinggi memiliki kemungkinan lebih kecil terhadap perilaku kecurangan keuangan. Penelitian oleh Ashma & Laksmi (2023) juga turut menyatakan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap *financial fraud*. Artinya adalah pengungkapan CSR berperan dalam meningkatkan transparansi sistem tata kelola perusahaan, sehingga mengurangi motivasi atau dorongan manajemen dalam melakukan kecurangan keuangan.

Penelitian ini berpatokan pada 3 teori utama yang relevan dengan fenomena kecurangan. Teori pertama yaitu *Agency Theory* yang dikembangkan oleh Jensen & Meckling (1976) dan menyatakan bahwa tindakan kecurangan dapat terjadi karena ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dan agen. Teori ini menyatakan peran penting komite audit terhadap tugasnya untuk mengawasi manajemen dan proses pelaporan keuangan (Prastyo & Rosharlianti, 2023). Teori kedua yang digunakan adalah *Fraud Theory* yang dinyatakan oleh Cressey (1953) namun kini telah dikembangkan menjadi konsep *fraud hexagon theory* yang menyatakan 6 komponen pemicu terjadinya *fraud* yaitu: tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kapabilitas, arogan, dan kolusi. teori ini mendasari pemahaman akan faktor

apa yang memicu terjadinya kecurangan dan bagaimana komite audit serta CSR dapat berperan dalam mengurangi faktor-faktor tersebut. Teori terakhir yaitu *Stakeholder Theory* yang dikembangkan oleh Freeman (1984) yang menekankan setiap perusahaan untuk turut memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder, bukan hanya para shareholder (Freeman & McVea, 2005). Teori ini relevan untuk memahami pentingnya pengungkapan *corporate social responsibility* sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh pihak berkepentingan dan penyajian sistem tata kelola yang baik dari sebuah perusahaan (Ashma & Laksmi, 2023).

Kesenjangan dalam penelitian ini terletak pada masih terbatasnya studi yang secara khusus meneliti peran komite audit dan pengungkapan CSR secara simultan terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan perbankan yang tercatat di BEI periode terbaru yaitu 2022-2024. Penelitian sebelumnya cenderung hanya fokus pada sektor industri yang berbeda selain perbankan dan masih menggunakan periode yang lama, juga hanya meneliti salah satu variabel secara terpisah, baik itu hanya komite audit atau CSR saja.

Penelitian ini memanfaatkan data terbaru dari sektor perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2022-2024. Penelitian ini menggunakan variabel peran komite audit yang berfokus pada keahlian komite audit dan pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) yang jarang diteliti secara bersamaan dalam konteks perbankan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman empiris terkait peran komite audit terhadap

kecurangan laporan keuangan dan meninjau bagaimana pengungkapan *corporate social responsibility* juga turut berpengaruh dalam transparansi eksternal yang lebih efektif untuk pencegahan kecurangan, khususnya pada industri perbankan yang memiliki kerentanan cukup tinggi akan praktik fraud. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian: “Analisis Pengaruh Peran Komite Audit dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI Periode 2022-2024”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adapun rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah peran komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan?
- b. Apakah pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Menguji dan meneliti pengaruh peran komite audit terhadap kecurangan laporan keuangan.
- b. Menguji dan meneliti pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap kecurangan laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan bagi perusahaan perbankan, regulator, bahkan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan sistem pengawasan keuangan dengan memperkuat peran komite audit dan menjaga efektivitas pelaksanaan CSR dalam upaya mencegah resiko kecurangan laporan keuangan. Penelitian ini juga berguna bagi regulator seperti OJK dan Bank Indonesia untuk mempertimbangkan penyusunan kebijakan pengawasan yang lebih efektif, termasuk fungsi audit internal dan tanggung jawab sosial perusahaan.

2. Manfaat Segi Teoritis

Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi, dalam pemahaman akan tata kelola perusahaan dan pencegahan kecurangan laporan keuangan. Mengkaji pengaruh peran komite audit dan pengungkapan *corporate social responsibility* dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai efektivitas pengawasan internal dalam sektor perbankan serta transparansi informasi terhadap integritas laporan keuangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang juga mengkaji tentang pengendalian fraud.